

## ANALISIS PPH, PPN&PPnBM, DAN CUKAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Syska Lady Sulistyowatie<sup>1</sup>, Sigit Adhi Pratomo<sup>2</sup>,  
Rizky Windar Amelia<sup>3</sup>, Rismanto Gatot Trisilo<sup>4</sup>

Program Vokasi, Universitas Widya Dharma Klaten<sup>1,3,4</sup>

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten<sup>2</sup>

Email: syskaladys@gmail.com<sup>1</sup>, ipsigit@gmail.com<sup>2</sup>,  
kiky.windar@gmail.com<sup>3</sup>, riesmku03@gmail.com<sup>4</sup>

---

### Abstract

*A country in order to organize a government requires funds to finance state spending. The state budget in Indonesia is mostly obtained from taxes because it is considered that it can no longer rely on natural resources. Taxes are levies that can be imposed on the community because they are regulated by law without receiving direct compensation. Facilities that can be enjoyed from paying taxes are scholarships, health, hospitals, roads, and so on. The greater the government's spending, the more the tax authorities must maximize tax revenues (Simamora & Suryaman, 2015). Over the past ten years, tax revenues in Indonesia have experienced ups and downs, coupled with the Covid 19 pandemic. The purpose of this study was to determine whether there was an influence of PPh, PPnBM, and Excise on tax revenues in Indonesia. The research method used was descriptive quantitative using multiple linear regression analysis tools. Based on the results of the data analysis, it shows that PPh, PPN & PPnBM, Excise have a positive and significant effect on Tax Revenues. The results of this study are expected to provide a contribution to thinking about tax revenues on state finances in Indonesia, so that tax revenues can be maximized.*

**Keywords:** PPh, PPnBM, Excise, Tax Revenue

---

### PENDAHULUAN

Suatu Negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan membutuhkan dana untuk membiayai belanja negara. Sebagian besar Anggaran belanja Negara di Indonesia diperoleh dari pajak karena dirasa sudah tidak dapat mengandalkan dari sumber daya alam (Sulistyowatie & Amelia, 2020). Pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan kepada masyarakat karena diatur dengan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Fasilitas yang dapat dinikmati dari pembayaran pajak adalah beasiswa, kesehatan, rumah sakit, jalan, dan sebagainya. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah, maka fiskus harus memaksimalkan penerimaan pajak (Simamora & Suryaman, 2015).

Demi keberlangsungan pemerintahan, masyarakat wajib membayar pajak sebagai bakti menjadi warga Negara yang baik. Pajak seyogyanya digunakan sebaik mungkin untuk pembiayaan Negara karena pajak merupakan amanah dari masyarakat pembayar pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi penyelenggara pemerintahan, maka kepatuhan wajib pajak sangat menentukan penerimaan pajak. Adapun salah satu penyebab penerimaan pajak tidak memenuhi target adalah ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak karena ketidakpuasan terhadap layanan pajak (Fadhilatunnisa et al., 2019).

Kepercayaan masyarakat sebagai pembayar pajak kepada fiskus sangat menentukan kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya. Perlunya menjaga kredibilitas fiskus guna menjaga kepercayaan masyarakat akan berpengaruh positif terhadap

pendapatan hasil pajak. Kasus tindak pidana pajak yang dilakukan pengelola pajak sangat menodai kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran pajaknya. Kepercayaan masyarakat perlu dibangun dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak.

Pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membiayai belanja Negara. Pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system* dalam yang berarti pemerintah mempercayakan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak kepada wajib pajak. *Self assessment system* dinilai berpeluang bagi wajib pajak melakukan tindak pidana pajak, sehingga diperlukan peraturan dan pemeriksaan agar wajib pajak melakukan kewajibannya (Dewata et al., 2017).

Penerimaan pajak terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya. Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Penerimaan pajak pernah mengalami penurunan pada waktu *pandemic covid-19*, karena pembayaran pajak dipengaruhi oleh perekonomian yang stabil. Adanya masyarakat yang sejahtera akan mendorong masyarakat membayar pajak. Pemungutan PPh selama ini masih menjadi polemik karena banyaknya varian PPh yang kemungkinan tidak diketahui wajib pajak. Pengenaan PPN dan PPnBM bertujuan untuk mencegah masyarakat hidup konsumtif. Sedangkan pengenaan cukai rokok bertujuan agar masyarakat tidak merokok demi kesehatan, karena jika masyarakat banyak yang menderita penyakit karena rokok akan mengakibatkan pengeluaran anggaran untuk kesehatan. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana pengaruh PPh, PPN&PPnBM, dan cukai berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

#### a. Pengaruh PPh terhadap Penerimaan Pajak

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2016). Negara membutuhkan pajak untuk menjalankan pemerintahan. PPh merupakan salah satu pendapatan pajak yang banyak macamnya. Pengenaan PPh bermacam-macam, tergantung jenis penghasilan yang diperoleh. Banyaknya pengenaan terhadap penghasilan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak.

H<sub>1</sub>: PPh berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

#### b. Pengaruh PPN&PPnBM terhadap Penerimaan Pajak

PPN&PPnBM adalah pajak yang dipungut secara tidak langsung atas konsumsi barang dan jasa yang tergolong mewah. Pengenaan PPN&PPnBM bertujuan agar masyarakat mengurangi hidup konsumtif demi kesejahteraan. Kenaikkan tarif PPN menjadi 11% berpotensi menurunkan penerimaan pajak karena harga barang menjadi mahal.

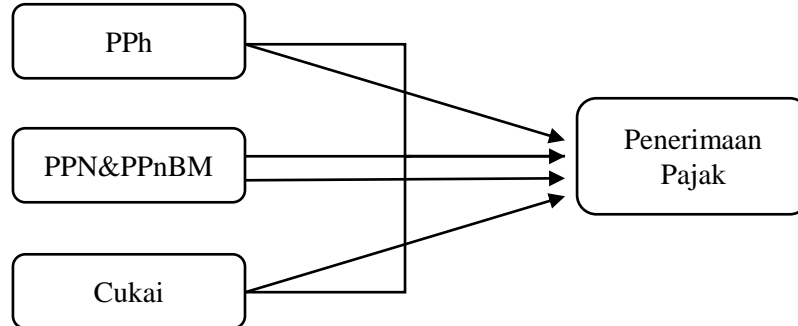
H<sub>2</sub>: PPnBM berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

#### c. Pengaruh Cukai terhadap Penerimaan Pajak

Pengenaan cukai bertujuan untuk mengurangi konsumsi terhadap barang-barang yang membahayakan kesehatan masyarakat. Kenaikkan tarif cukai diharapkan akan mengurangi konsumsi terhadap barang yang membahayakan kesehatan karena harga menjadi naik.

H<sub>3</sub>: Cukai berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

## Kerangka Pikir



## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis apakah terdapat pengaruh pada PPh, PPnBM, dan Cukai terhadap penerimaan pajak. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda menggunakan SPSS dengan variabel bebas PPh, PPnBM, dan Cukai sedangkan variabel terikatnya adalah penerimaan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya. Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Sampel yang digunakan adalah penerimaan PPh, PPnBM, dan Cukai dalam rentang waktu 2014-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari website <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita> dan [bps.go.id](https://www.bps.go.id).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data Penelitian

Sebelum masuk pada pengujian/analisis data dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan diuraikan hasil dari analisis deskriptif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah ringkasan hasil analisis deskriptif dari variabel PPh, PPN&PPnBM, dan Cukai. Penelitian ini menggunakan sampel penerimaan pajak dari selama empat tahun, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2023. Deskriptif dari variabel-variabel penelitian ditunjukkan oleh Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPh (X1)	10	13.21	13.86	13.4810	.21497
PPN&PPnBM (X2)	10	12.92	13.52	13.1460	.20748
Cukai (X3)	10	11.68	12.33	12.0330	.20737
Penerimaan Pajak (Y)	10	13.95	14.57	14.2060	.20673
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Olah data, 2024.

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi sehingga diperoleh model regresi dari metode kuadrat terkecil yang menghasilkan estimator linier tidak bias. Model regresi yang diperoleh berdistribusi normal dan terbebas dari gejala autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

### a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian adanya multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan besarnya *tolerance value* dan besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*) (Ghozali, 2018). Jika nilai *tolerance value* > 0,10 atau < 1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Uji Multikolinieritas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
PPh (X1)	.102	9.806
PPnBM (X2)	.063	8.925
Cukai (X3)	.174	5.751

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber: Olah data, 2024.

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui hasil perhitungan dengan menggunakan *SPSS 20.0*, menunjukkan bahwa nilai *tolerance value* > 0,10 atau < 1 dan VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak terjadi multikolinieritas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

### b. Uji Autokorelasi

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi digunakan uji DW (Durbin Watson) dengan melihat koefisien korelasi DW test. Hasil perhitungan dengan *SPSS 20.0*, diperoleh nilai statistik Durbin Watson sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Model	Model Summary <sup>b</sup>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.999 <sup>a</sup>	.998	.998	.01031	1.291

a. Predictors: (Constant), Cukai (X3), PPh (X1), PPnBM (X2)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Sumber: Olah data, 2024.

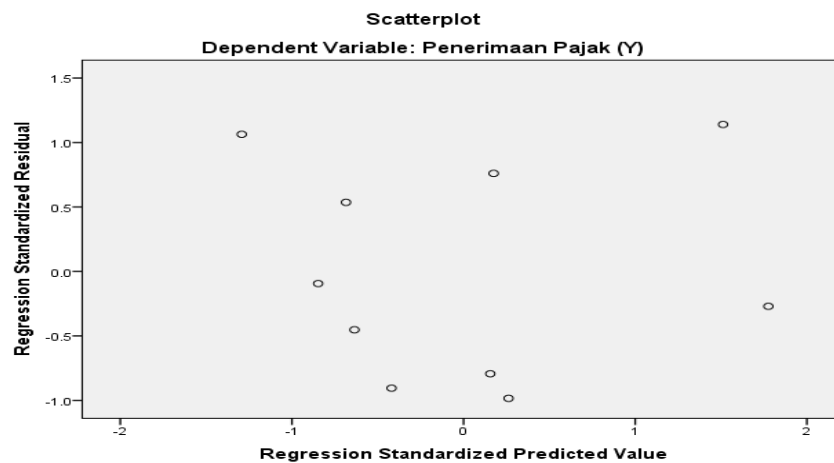
Hasil perhitungan pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson test adalah 1,291. Sedangkan berdasarkan tabel Durbin Watson, dapat diketahui nilai  $d_L =$

0,5253 dan nilai  $d_U = 2,0163$ . Jadi nilai Durbin Watson sebesar 1,291 berada diantara nilai nilai  $d_L = 0,5253$  dan nilai  $d_U = 2,0163$  yang artinya tidak ada autokorelasi.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai diagram *scatterplot*.

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas



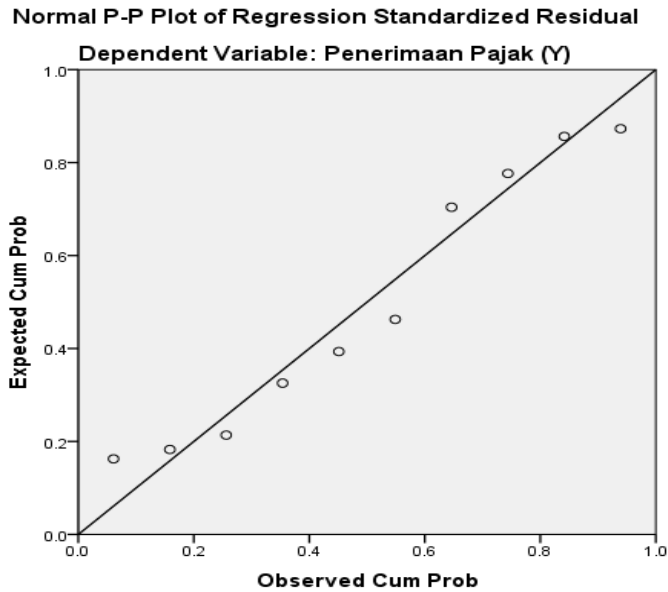
Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Olah data, 2024.

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### d. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui normalitas dan bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Sehingga apabila data tersebut memiliki distribusi normal maka uji-t dan uji F dapat dilakukan, sementara apabila asumsi normalitas tidak dapat dipenuhi maka inferensi tidak dapat dilakukan dengan statistik t dan F. Hasil uji normalitas dengan Normal P-P Plot dengan regresi dapat ditunjukkan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Uji Normalitas  
Sumber: Olah data, 2024.

Hasil uji normalitas dengan Normal P-P Plot menunjukkan bahwa angka probabilitas disekitar garis linier atau lurus. Artinya bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki random data yang berdistribusi normal. Sehingga pengujian statistik selanjutnya dapat dilakukan baik uji-t maupun uji F.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji-t test dapat ditunjukkan pada Tabel 4 Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel PPh, PPN & PPnBM, dan Cukai secara *parsial* terhadap pendapatan negara di Indonesia.

Tabel 4. Uji Hipotesis Secara *Parsial* (Uji t)  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.003	.220		4.565	.004
1 PPh (X1)	.467	.050	.485	9.330	.000
PPnBM (X2)	.390	.066	.391	5.901	.001
Cukai (X3)	.148	.040	.149	3.731	.010

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)  
Sumber: Olah data, 2024.

Berdasarkan tabel 4 mengenai pengaruh PPh, PPN&PPnBM, dan Cukai terhadap penerimaan Negara diperoleh persamaan regresinya:

$$Y = 1,003 + 0,467 + 0,390 + 0,148$$

Hasil uji t berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4 di atas, diperoleh:

- 1) Nilai P value hasil uji-t dari variabel PPh sebesar 0,000. Dikarenakan nilai P value lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau  $(0,000 < 0,05)$ , maka  $H_1$  diterima yang berarti variabel PPh berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
- 2) Nilai P value hasil uji-t dari variabel PPN&PPnBM sebesar 0,001. Dikarenakan nilai P value lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau  $(0,001 < 0,05)$ , maka  $H_2$  diterima yang berarti variabel PPN&PPnBM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
- 3) Nilai P value hasil uji-t dari variabel Cukai sebesar 0,000. Dikarenakan nilai P value lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$  atau  $(0,010 < 0,05)$ , maka  $H_3$  ditolak yang berarti variabel Cukai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

### b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil uji F dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	.384	3	.128	1205.224	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.001	6	.000		
	Total	.385	9			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Cukai (X3), PPh (X1), PPnBM (X2)

Sumber: Olah data, 2024.

Berdasarkan Tabel 5 nilai F hitung (*sig.*) sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat *signifikansi* 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh PPh, PPN&PPnBM, dan Cukai secara simultan terhadap penerimaan pajak.

### c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh PPh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Hasil koefisien determinasi berganda dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.999 <sup>a</sup>	.998	.998

a. Predictors: (Constant), Cukai (X3), PPh (X1), PPnBM (X2)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

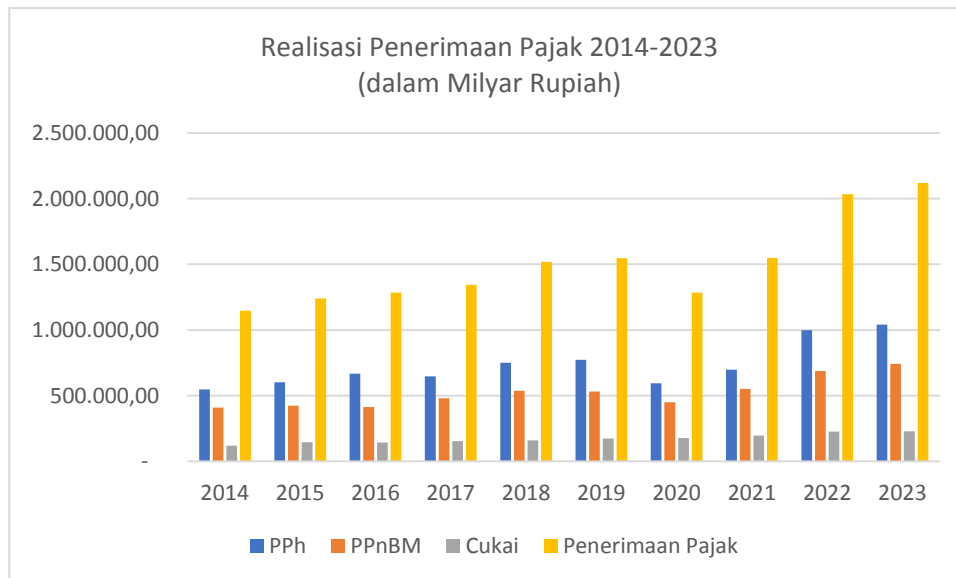
Sumber: Olah data, 2024.

Berdasarkan tabel 6 diatas, diperoleh korelasi R Square sebesar 0,998 yang artinya adalah besarnya persentase pengaruh PPh, PPN&PPnBM, dan Cukai terhadap penerimaan pajak sebesar 99,8%. Sedangkan sisanya  $100\% - 99,8\% = 0,2\%$  dipengaruhi oleh variabel lain.

## Pembahasan

### Pengaruh PPh terhadap penerimaan pajak

Hasil olah data yang telah dilakukan, dapat diketahui PPh berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penerimaan pajak dalam suatu Negara tergantung stabilitas perekonomian di Negara tersebut. Masyarakat yang sejahtera akan mampu membayar pajak, sebaliknya masyarakat yang tidak sejahtera enggan membayar pajak. Pemungutan PPh terdiri dari berbagai macam penghasilan, yang artinya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sejatinya pajak digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan seperti pembangunan infrastruktur, pembiayaan sosial dan regulasi dalam mengatur kegiatan yang berdampak negatif seperti pajak karbon.



Gambar 3. Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2023

Pendapatan PPh meningkat setiap tahun kecuali tahun 2020 karena terjadi *pandemic covid-19* yang menyebabkan perekonomian lumpuh, sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak. Syarat utama terpenuhinya kewajiban perpajakan adalah perekonomian yang kondusif. Faktor lain yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak adalah tindakan fiskus yang melakukan penggelapan pajak, wajib pajak merasa kecewa sehingga enggan membayar pajak.

Agar pemungutan pajak dapat terus berlanjut perlu adanya upaya penertiban pajak dari fiskus untuk mengurangi penghindaran pajak (Floropoulos et al., 2024). Adanya kualitas hubungan yang baik seperti keadilan prosedural dan transparansi antara fiskus dan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan PPh (Siglé et al., 2022). Penghindaran pajak seringkali disebabkan persepsi kebijakan pajak yang dinilai tidak adil oleh wajib pajak (Khalil & Sidani, 2022). Pemerintah harus lebih bijak dalam menetapkan peraturan pajak, karena membayar pajak artinya mengurangi penghasilan wajib pajak sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pemungutannya.

## **Pengaruh PPN&PPnBm terhadap penerimaan pajak**

Berdasarkan hasil olah data, dapat diketahui bahwa PPN&PPnBM berpengaruh positif dan signifikan. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% sejak 1 april 2022 berpotensi menaikkan pendapatan pajak. Kenaikkan tarif PPN tidak berpengaruh terhadap inflasi, sehingga konsumsi masyarakat tidak begitu terpengaruh (Kharisma & Furqon, 2018). Gaya hidup konsumtif dan cenderung menyukai barang bermerek masyarakat Indonesia tidak berpengaruh dengan kenaikan kenaikan tarif PPN, jadi masyarakat akan tetap membeli barang mewah meskipun harganya naik. Hal ini sangat menguntungkan bagi Negara karena realisasi penerimaan PPN&PPnBM tetap tercapai meskipun tarif PPN naik.

## **Pengaruh Cukai terhadap penerimaan pajak**

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh hasil bahwa cukai berpengaruh positif dan signifikan. Kenaikan tarif cukai tidak menyurutkan minat masyarakat dalam membeli barang kena cukai terutama rokok. Semakin tinggi pemerintah menetapkan tarif cukai maka semakin tinggi pula penerimaan cukai yang diterima pemerintah (Santosa et al., 2021). Tujuan pemerintah menaikkan cukai adalah mengurangi konsumsi rokok, tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap konsumen rokok.

Pajak merupakan distribusi pendapatan dari yang kaya ke miskin, dari wajib pajak kepada Negara. Penetapan tarif progresif di Indonesia menguntungkan bagi yang berpenghasilan rendah, namun sangat merugikan bagi yang berpenghasilan tinggi. Kebijakan pajak juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga penetapan peraturan hendaknya melihat kondisi perekonomian secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Penetapan kebijakan pajak jangan sampai menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, atau bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi. Diperlukan keseimbangan antara penetapan kebijakan pajak dan pelaksanaan aplikasi pajak agar pemerintahan tetap berjalan dan masyarakat tetap dapat menikmati hasil dari pajak yang dibayarkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dengan penghitungan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PPh berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. PPN&PPnBM Cukai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Cukai berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

## **SARAN**

Saran yang dapat kami berikan kaitannya dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan pajak sebaiknya mempertimbangan dari segi perekonomian karena dengan perekonomian yang stabil wajib pajak akan mampu membayar pajaknya.
2. Pelaksaaan timbal balik dari adanya pajak yang dipungut haruslah seimbang agar tercipta keadilan diantara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintahan sebagai pelaksana dari pajak.
3. Agar hasil penelitian lebih efektif sebaiknya ditambahkan variabel agar hasil yang diteliti lebih valid.
4. PPh, PPN&PPnBM, dan Cukai berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewata, E., Jauhari, H., Sari, Y., & Mouliyane, C. A. (2017). Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 26–34.
- Fadhilatunnisa, D., Amran, A., & Cahyani, A. (2019). Pengaruh Pph 21 Terhadap Penerimaan Pada Kpp Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 72–78.
- Floropoulos, S., Tsipouridou, M., & Spathis, C. (2024). Book-tax conformity and earnings management: A research agenda. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 54, 100603.
- Khalil, S., & Sidani, Y. (2022). Personality traits, religiosity, income, and tax evasion attitudes: An exploratory study in Lebanon. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 47, 100469.
- Kharisma, N., & Furqon, I. K. (2018). Analisis dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai hasil produksi. *Universitas Brawijaya*, 2, 6. [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/Wiwit Wijayanti.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165450/1/Wiwit%20Wijayanti.pdf)
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (9th ed). Salemba Empat.
- Santosa, D. I., Supriyono, S., & Marka, M. M. (2021). Pengaruh Cukai dan Pajak Rokok terhadap Penerimaan Cukai melalui Harga Eceran Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus. *Borobudur Management Review*, 1(1), 32–55.
- Siglé, M. A., Goslinga, S., Speklé, R. F., & van der Hel, L. E. C. J. M. (2022). The cooperative approach to corporate tax compliance: An empirical assessment. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100447.
- Simamora, P., & Suryaman, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong. *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*, 1(1), 25–31.
- Sulistyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 75–82.